



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Krisis ekonomi dalam 4 tahun terakhir yang melanda Indonesia beberapa negara dikawasan Asia Pasifik, telah membuka kesadaran dan cakrawala baru. Sektor pertanian, khususnya perkebunan yang akhir-akhir ini daya tariknya tertutupi oleh glamournya sektor industri mencuat kembali sebagai sektor usaha yang menarik. Bahkan berbagai kalangan melihat bahwa usaha di bidang perkebunan merupakan usaha yang strategis untuk perekonomian Indonesia paling tidak selama 20 – 30 tahun mendatang. Salah satu daya tarik utamanya adalah sesuai dengan perjalanan sejarahnya sebagai penghasil devisa negara untuk kelompok ekspor non migas.

Pembangunan perkebunan yang dilaksanakan selama ini pada dasarnya mengacu kepada arahan pembangunan nasional, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 serta amanat rakyat yang tertuang dalam Ketetapan (TAP) MPR Nomor XVII/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi dan TAP MPR Nomor IV/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan negara (GBHN) Tahun 1999 – 2004 serta Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000 – 2004. Didalam PROPENAS digariskan bahwa kebijaksanaan pembangunan bidang ekonomi adalah mempercepat pemulihan ekonomi dan mewujudkan landasan pembangunan yang lebih kukuh bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan. Wujud perekonomian yang akan dibangun harus lebih adil

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik IPB



MB-IPB

Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis
Institut Pertanian Bogor

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



dan merata, mencerminkan peran daerah dan pemberdayaan seluruh rakyat, berdaya saing dengan berbagai efisiensi dan menjamin keberlanjutan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Dengan menghayati berbagai landasan pembangunan tersebut, maka pengelolaan perkebunan harus tunduk dan taat pada amanah tersebut. Memperhatikan peran penting pembangunan perkebunan baik dalam aspek ekonomi, sosial maupun ekologi dan mempedomani tuntutan pembangunan nasional serta memperhatikan peran dan potensi perkebunan dalam pembangunan nasional, maka ditetapkan visi pembangunan perkebunan yaitu terwujudnya pembangunan sistem dan usaha agribisnis perkebunan yang efisien, produktif dan berdaya saing tinggi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara berkeadilan dan berkelanjutan serta terdesentralisasi melalui pengelolaan sumber daya secara optimal dan berkesinambungan (Departemen Pertanian, 2002).

Secara ringkas misi pembangunan perkebunan adalah harus memberdayakan masyarakat, menciptakan sistem dan usaha agribisnis berbasis perkebunan yang berdaya saing tinggi, berkerakyatan, berkeadilan, berkelanjutan serta mengembangkan budaya industri sebagai landasan untuk kemajuan usaha perkebunan di tanah air. Berdasarkan kondisi yang ada serta berbagai kecenderungan yang akan terjadi di masa yang akan datang, maka **strategi** pembangunan agribisnis perkebunan yang ditempuh adalah meningkatkan daya adaptasi dan inovasi seluruh pelaku usaha agribisnis perkebunan sehingga mampu

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik IPB



MB-IPB
Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis
Institut Pertanian Bogor

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



memanfaatkan peluang usaha secara efisien dan berdaya saing dengan tetap memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup (Dirjenbun, 2002).

Untuk melaksanakan visi, misi dan strategi pembangunan agribisnis perkebunan yang telah ditetapkan, Direktorat Jendral Perkebunan RI telah menetapkan **kebijaksanaan dasar** pembangunan perkebunan yaitu “Memberdayakan di hulu dan memperkuat di hilir guna menciptakan peningkatan nilai tambah dan daya saing usaha perkebunan, dengan partisipasi penuh dari masyarakat perkebunan serta penerapan organisasi modern yang berlandaskan kepada penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Kebijakan pembangunan tersebut menjadi landasan dan acuan bagi pengembangan komoditas perkebunan termasuk pengembangan kelapa sawit dan ditempuh melalui pendekatan mekanisme pasar.

Pendekatan mekanisme pasar perlu ditempuh mengingat komoditas kelapa sawit merupakan komoditas perdagangan dunia, dimana keberhasilan untuk menembus pasar sangat tergantung dari daya saing terhadap komoditas sejenis yang dihasilkan oleh negara lain. Untuk itu melalui integrasi kegiatan *on-farm* dan *off-farm*, diharapkan akan memberikan nilai tambah yang lebih banyak kontribusinya bagi kesejahteraan masyarakat.

Memperhatikan kebijaksanaan pengembangan perkebunan tersebut, maka upaya yang perlu ditempuh dalam pengembangan agribisnis kelapa sawit menurut Pakpahan (2002), dapat ditempuh melalui :





1. Mendorong peningkatan produktivitas tanaman antara lain melalui penyediaan sarana produksi yang terjangkau diikuti dengan upaya pemeliharaan tanaman yang intensif.
 2. Mendorong peningkatan mutu produksi antara lain melalui panen tepat waktu, pengolahan TBS (tandan buah segar) yang lebih efisien dan perbaikan jaringan transportasi TBS.
 3. Mengembangkan kawasan industri perkebunan (KIM-Bun) yang terpadu meliputi kegiatan *on-farm* dan *off-farm* terutama di sentra produksi kelapa sawit, dan mendorong petani untuk memiliki kebun dan unit pengolahan.
- Mengupayakan dukungan sarana-prasarana pendukung untuk pengembangan kelapa sawit, antara lain permodalan, jalan/jembatan, tanki timbun dan pelabuhan yang memadai.
- Peningkatan kemampuan SDM perkebunan melalui berbagai kegiatan pendidikan, pelatihan serta pendampingan (magang).

Pada tahun 2000 luas areal perkebunan kelapa sawit Indonesia telah mencapai 3,39 juta hektar dengan produksi minyak kelapa sawit 6,27 juta ton (Dirjenbun, 2002). Ditinjau dari segi bentuk pengusahaannya terbagi atas perkebunan rakyat seluas 1,6 juta hektar (32,2%), perkebunan negara seluas 0,52 juta hektar (15,4%), dan perkebunan besar swasta seluas 1,8 juta hektar (52,4%). Sedangkan ditinjau dari alokasi areal perkebunan, saat ini telah tersebar di 17 propinsi dan areal terluas terdapat di pulau Sumatera yaitu seluas 2,24 juta hektar (66,08%) khususnya Sumatera Utara mencapai 615 ribu hektar, dan diikuti

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik IPB



MB-IPB
Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis
Institut Pertanian Bogor

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Kalimantan seluas 563 ribu hektar (16,6%) dari total areal sawit nasional.

Wilayah Sumatera yang mendominasi sekitar 66,08% areal perkebunan kelapa sawit nasional lebih disebabkan karena dari segi kesesuaian lahan dan infrastruktur lebih memadai daripada wilayah lainnya.

Pada tahun 2000, di Indonesia terdapat pabrik pengolahan minyak kelapa sawit (PMKS) sebanyak 221 unit dengan kapasitas terpasang 9.166 ton TBS/jam, dimana sebanyak 84 unit (kapasitas 2.979 ton TBS/jam) berada di Sumatera Utara atau 32,50% dari total kapasitas produksi nasional, diikuti Riau sebanyak 44 unit (kapasitas 2.062 ton TBS/jam) dan Sumatera Selatan sebanyak 20 unit (kapasitas 1.155 ton TBS/jam) sebagaimana pada tabel 1 berikut ini.

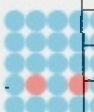
Tabel 1 : Distribusi lahan kelapa sawit dan PMKS di Indonesia tahun 2000

No.	Propinsi	Perkebunan Kelapa Sawit		Pabrik PMKS		
		Luas (Hektar)	Komposisi (%)	Jumlah (Unit)	Kapasitas (Ton TBS/jam)	Komposisi (%)
1	Aceh	206.405	6,51%	14	410	4,47%
2	Sumatera Utara	627.545	19,78%	84	2.979	32,50%
3	Sumatera Barat	168.027	5,30%	6	240	2,62%
4	Riau	633.413	19,97%	44	2.062	22,50%
5	Jambi	265.571	8,37%	13	600	6,55%
6	Sumatera Selatan	329.242	10,38%	20	1.155	12,60%
7	Bengkulu	54.191	1,71%	6	230	2,51%
8	Lampung	99.557	3,14%	4	125	1,36%
9	Jabar & Banten	20.926	0,66%	2	90	0,98%
10	Kalimantan Barat	314.616	9,92%	12	655	7,15%
11	Kalimantan Tengah	99.877	3,15%	3	120	1,31%
12	Kalimantan Selatan	105.999	3,34%	3	110	1,20%
13	Kalimantan Timur	116.888	3,68%	3	130	1,42%
14	Sulawesi Tengah	39.318	1,24%	1	30	0,33%
15	Sulawesi Selatan	62.993	1,99%	4	150	1,64%
16	Papua	27.855	0,88%	2	80	0,87%
	Jumlah	3.172.423	100,00%	221	9.166	100,00%

Sumber : Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS), 2002

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Hak cipta dilindungi Undang-Undang



Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis
 Institut Pertanian Bogor
MB-IPB



Hak cipta dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik IPB



Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis
Institut Pertanian Bogor

MB-IPB

Dalam Tabel 1 diatas nampak bahwa tahun 2000 lebih dari 50% luas areal perkebunan kelapa sawit berada di 3 (tiga) wilayah yaitu propinsi Riau, Sumatera Utara dan Sumatera Selatan. Demikian juga pabrik PMKS sebanyak 148 unit dengan kapasitas 6.196 ton TBS/jam atau 67,60% terdapat di ketiga propinsi tersebut, terutama propinsi Riau sebanyak 44 unit (kapasitas 2.062 ton TBS/jam) atau 22,50% dari total kapasitas produksi nasional.

Menurut Pakpahan (2002), akibat krisis ekonomi telah menyebabkan tertundanya beberapa pembangunan perkebunan kelapa sawit, sementara kebun yang telah tertanam kurang mendapat perawatan sesuai dengan baku teknis yang dianjurkan. Sampai tahun 2001 terdapat sekitar 894 ribu hektar (sebanyak 88,25% diantaranya di Sumatera dan Kalimantan) dari rencana total program pengembangan kelapa sawit yang belum dapat diselesaikan atau masih berupa tanaman belum menghasilkan (TBM). Disamping itu untuk memenuhi keperluan pengolahan TBS terutama dari kebun rakyat yang dikembangkan melalui pola PIR-Trans dan PIR-KKPA maupun kebun rakyat non PIR, sampai saat ini masih diperlukan pembangunan pabrik baru berupa pabrik pengolahan kelapa sawit atau lazim disebut dengan Pabrik Minyak kelapa Sawit (PMKS) sebanyak 47 unit dengan kapasitas masing-masing sebesar 30 ton TBS/jam atau equivalen 1.410 ton TBS/jam.

Untuk mengantisipasi melimpahnya produksi TBS seiring dengan bertambahnya luas areal kebun produksi sehubungan dengan bertambahnya umur dan beralihnya tanaman TBM menjadi TM (tanaman



menghasilkan) dari kebun rakyat tersebut, maka peranserta terutama pihak swasta sangat diharapkan untuk membangun PMKS baru secara bertahap. Pembangunan PMKS tersebut kiranya akan terlaksana dengan baik apabila terdapat dukungan dari pemerintah secara kondusif dan tersedianya modal baik yang disediakan sendiri oleh investor maupun pinjaman dari pihak ketiga terutama perbankan.

Bagi Indonesia produk minyak sawit selain sebagai komoditi ekspor non migas juga merupakan konsumsi domestik terutama sebagai bahan baku minyak goreng dan bahan baku industri. Konsumsi minyak goreng penduduk Indonesia mencapai sebesar 11,75 Kg/tahun/kapita, dan jumlah penduduk 210 juta jiwa, maka kebutuhan minyak goreng mencapai sekitar 2,46 juta ton. Jumlah tersebut terdiri dari 80% berasal dari minyak goreng sawit (*RBD Palm Oil*) atau sekitar 1,97 juta ton (GAPKI, 2002). Apabila tendemen pengolahan CPO menjadi minyak goreng rata-rata sebesar 72%, maka kebutuhan bahan baku berupa CPO setiap tahunnya \pm 2,71 juta ton. Mengingat besarnya konsumsi minyak goreng dalam negeri baik untuk konsumsi rumah tangga maupun industri makanan, maka diperkirakan produksi minyak goreng akan meningkat sekitar 11,3% pertahun dalam beberapa tahun mendatang. Peningkatan produksi tersebut meliputi minyak goreng sawit yang meningkat sekitar 12,9% pertahun dan minyak goreng kelapa meningkat 5,4% pertahun. Dengan demikian kontribusi minyak goreng sawit akan semakin dominan sebagaimana pada Tabel 2.

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

©Jaktipic/Minis IPB



Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis
Institut Pertanian Bogor
MB-IPB



Tabel 2. Perkembangan Produksi Minyak Goreng Indonesia Periode Tahun 1995 – 2005 (Dalam Ton)

Tahun	Minyak Goreng Sawit	Growth (%)	Share (%)	Minyak Goreng Kelapa	Growth (%)	Share (%)	Jumlah Total	Growth (%)
1995	1.731.300		71,20	702.000		28,80	2.433.300	
1996	1.999.700	15,50	72,70	751.800	7,10	27,30	2.751.500	13,10
1997	2.336.300	16,80	70,60	972.800	29,40	29,40	3.309.100	20,30
1998	2.309.700	-1,10	76,20	720.700	-25,90	23,80	3.030.400	-8,40
1999	2.598.400	12,50	77,30	763.900	6,00	22,70	3.362.400	11,00
2000	2.923.200	12,50	78,30	809.800	6,00	21,70	3.733.000	11,00
2001	3.303.200	13,00	79,40	858.400	6,00	20,60	4.161.600	11,50
2002-P	4.217.900	13,00	80,60	901.300	5,00	19,40	4.633.900	11,30
2003-P	4.766.200	13,00	81,70	946.300	5,00	18,30	5.164.200	11,40
2004-P	4.766.200	13,00	82,70	993.700	5,00	17,30	5.759.900	11,50
2005-P	5.385.800	13,00	83,80	1.043.300	5,00	16,20	6.429.200	11,60
Average Growth (%)		12,90			5,40			11,30

*) P = proyeksi

Sumber : Business Intelligence Report, 2002

Demikian juga kondisi di pasar internasional, memperhatikan data tersebut diatas nampak bahwa selama 10 tahun terakhir pertumbuhan konsumsi minyak sawit lebih cepat daripada pertumbuhan produksi. Data *Oil World* (2000) menunjukkan total konsumsi minyak dan lemak dunia tahun 1998 mencapai 102,9 juta ton yang meliputi minyak kedelai 24%, minyak hewani 20%, minyak sawit 19%, minyak lobak 12%, minyak matahari 8% dan aneka minyak lain 17%. Kontribusi minyak kedelai dan minyak sawit menunjukkan kecenderungan meningkat dimana kontribusi tahun 1992 masing-masing baru 19,4% dan 16,4%. Sampai saat ini konsumsi minyak kedelai lebih besar dibandingkan minyak sawit, hal ini karena konsumsi Amerika Serikat dan Amerika Latin yang juga sebagai produsen minyak kedelai adalah yang terbesar. Besarnya konsumsi minyak sawit dikawasan Asia (khususnya Cina dan India) tidak terlepas dari potensi pasar yang luas dengan jumlah penduduk yang sangat besar. Selain itu tingkat harga minyak sawit yang lebih murah dibandingkan dengan minyak kedelai sehingga dengan pendapatan perkapita yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik IPB



Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis
Institut Peranakan Bogor
MB-IPB



relatif masih rendah minyak sawit sebagai salah satu daya tarik konsumen sehingga mampu bersaing di pasar global. Sebagai gambaran berikut disajikan tabel 3 tentang rasio perbandingan antara ekspor dan konsumsi terhadap produksi minyak sawit dunia periode 10 tahun terakhir.

Tabel 3. Perkembangan Rasio Perbandingan Antara Ekspor, Konsumsi Terhadap Produksi CPO Dunia Periode Tahun 1991 s/d. 2001

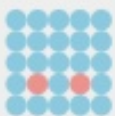
Tahun	Volume (Ribu Ton)				Perbandingan (%)		
	Produksi	Impor	Ekspor	Konsumsi	Ekspor Vs Produksi	Ekspor Vs Konsumsi	Konsumsi Vs Produksi
1	2	3	4	5	6 = 4 : 2	7 = 4 : 5	8 = 5 : 1
1991	11.475	8.533	8.604	11.602	74,98%	74,16%	101,11%
1992	12.125	8.444	8.375	12.243	69,07%	68,41%	100,97%
1993	13.806	9.445	9.445	13.259	68,41%	71,23%	96,04%
1994	14.157	10.759	10.905	14.657	77,03%	74,40%	103,53%
1995	15.217	10.472	10.303	16.026	67,71%	64,29%	105,32%
1996	16.283	10.735	10.733	16.026	65,92%	66,97%	98,42%
1997	17.844	12.308	12.374	17.715	69,35%	69,85%	99,28%
1998	16.679	11.259	11.323	17.313	67,89%	65,40%	103,80%
1999	17.524	11.780	11.843	18.264	67,58%	64,84%	104,22%
2000	18.412	12.326	12.386	19.268	67,27%	64,28%	104,65%
2001	19.344	12.896	12.954	20.327	66,97%	63,73%	105,08%

Sumber : Oil World dalam berbagai terbitan (diolah), 2002

Selain sebagai sumber minyak makan, produk turunan kelapa sawit ternyata masih banyak manfaatnya dan sangat prospektif untuk dapat lebih dikembangkan. Produk turunan tersebut antara lain :

- ◆ **Produk turunan Minyak Sawit Kasar (CPO).** Selain minyak makan, dapat dihasilkan *margarine, shortening, vanaspati (vegetable ghee), ice creams, bakery fats, instans noodle, sabun dan detergent, cocoa butter extender, chocolate dan coatings, speciality fats, dry soap mixes, sugar confectionary, biskuit cream fats, filled milk, lubrication, textilles oils* dan bio diesel. Khusus bio diesel, permintaan akan produk ini pada beberapa tahun mendatang akan semakin meningkat terutama

Hak cipta dilindungi Undang-Undang



Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis
Institut Pertanian Bogor
MB-IPB



diterapkannya kebijaksanaan di beberapa negara Eropa untuk menggunakan *renewable energy*.

- ◆ **Produk turunan Minyak Inti Sawit (PKO).** Dari produk turunan ini dapat menghasilkan *shortening, cocoa butter substitute, specials fats, ice cream, coffee whitener cream, sugar confectionary, biscuit cream fats, filled mild, imitation cream*, sabun, detergent, shampoo dan kosmetik.
- ◆ **Produk turunan Oleochemicals Kelapa Sawit.** Dari produk turunan ini akan dapat menghasilkan produk *methyl esters, plastic, textile processing, metal processing, lubricants, emulsifiers, detergent, gliserine, cosmetic, pharmaceutical products* dan *food protective coatings*.

Memperhatikan kondisi ini, maka PT Sawita Leidong Jaya merupakan salah satu dari beberapa perusahaan yang berusaha menangkap peluang bisnis untuk mendapatkan nilai tambah dari kelapa sawit rakyat yaitu membangun Pabrik Minyak Kelapa Sawit (PMKS) kapasitas 120 ton TBS/jam dengan produk akhir berupa minyak sawit mentah (CPO) dan inti sawit (*kernel*) yang merupakan bahan baku industri hilir. Pembangunan pabrik PMKS tersebut telah dimulai sejak bulan Nopember 2002 dan diperkirakan pembangunannya akan selesai dalam jangka waktu selama 12 bulan dengan lokasi usaha di Desa Boltrem Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir – Riau. Keberadaan PMKS dengan kapasitas produksi terbesar di Indonesia tersebut diperlukan untuk menampung/ mengolah seluruh produksi tandan buah

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik IPB



MIB-IPB

Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis
Institut Pertanian Bogor

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Penguutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Penguutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



segar (TBS) dari kebun kelapa sawit rakyat di wilayah sekitar Kabupaten Rokan Hilir yang tergabung dalam 14 (empat belas) Koperasi. Mengingat investasi PMKS kapasitas 120 ton TBS/jam memerlukan dana dalam jumlah besar yaitu sekitar Rp.150 milyar dan sumber bahan baku berupa TBS seluruhnya tergantung pemasok eksternal (kebun rakyat/ Koperasi), maka pihak manajemen PT Sawita Leidong Jaya memandang perlu untuk melakukan kajian secara mendalam tentang kelayakan usahanya.

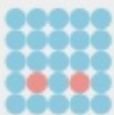
1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, rumusan masalah yang terkait dengan pembangunan pabrik PMKS kapasitas 120 ton TBS/jam yang akan dilakukan oleh PT Sawita Leidong Jaya di Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau, adalah :

- Pemanfaatan nilai tambah kelapa sawit belum dilakukan secara optimal sehubungan dengan melimpahnya produksi TBS khususnya dari perkebunan rakyat yang berada disekitar lokasi usaha.
- Ketergantungan pasokan TBS dalam jumlah besar dari luar perusahaan, pada suatu saat dapat menimbulkan terganggunya kontinuitas pasokan bahan baku pabrik, yaitu perusahaan akan berhadapan dengan perusahaan pesaing pencari bahan baku (TBS).
- Lokasi bahan baku pabrik yang terpencar-pencar, akan menjadi kendala dan hambatan perusahaan terutama yang berhubungan dengan proses pengangkutan bahan baku (TBS) dari lokasi pemasok ke pabrik PMKS.

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Tim MB-IPB



Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis
Institut Perencanaan Bogor
MB-IPB

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



4. Produksi TBS dari kebun rakyat memiliki kualitas yang tidak seragam sehingga dapat menyebabkan tidak terpenuhinya standar kualitas produk akhir yang dihasilkan oleh pabrik.
5. Perusahaan selama ini memasarkan produk akhirnya berupa minyak sawit (CPO) dan kernel hanya terbatas kepada perusahaan besar tertentu dan belum memiliki jaringan pemasaran yang kuat terutama pasar ekspor.
6. Perlu tersedianya dana investasi yang cukup besar untuk membangun pabrik PMKS kapasitas 120 ton TBS/jam.

© Hak Cipta Milik IPB

1.3. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini dibatasi masalah mengenai tingginya tingkat ketergantungan perusahaan terhadap pemasok bahan baku. Hal tersebut dapat dilihat dari tidak dimilikinya kebun sendiri sebagai sumber bahan baku sehingga perlu strategi dalam menjamin kontinuitas pasokan bahan baku. Disamping itu adanya masalah besarnya dana yang diperlukan untuk investasi dan modal kerja pabrik, sementara ada keterbatasan bagi pemilik untuk menyediakan modal sendiri.

1.4. Perumusan Masalah

Investasi dibidang industri pengolahan minyak kelapa sawit merupakan keputusan yang strategis bagi perusahaan sehingga diperlukan kajian yang lebih mendalam agar tujuan perusahaan untuk meningkatkan pendapatan melalui perolehan nilai tambah dari kelapa sawit dapat terwujud yang bermuara kepada perolehan laba perusahaan



Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis
Institut Pertanian Bogor

MB-IPB

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



secara keseluruhan. Penjelasan rumusan masalah tersebut dapat dikembangkan melalui pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana kesiapan PT Sawita Leidong Jaya dalam investasi PMKS kapasitas 120 ton TBS/jam baik dari aspek teknis dan teknologi dengan adanya berbagai faktor kendala yang dihadapi.
2. Apakah rencana investasi PMKS kapasitas 120 ton TBS/jam secara finansial layak untuk dijalankan.
3. Bagaimana komposisi pendanaan investasi yang paling baik agar diperoleh pengembalian investasi dalam jangka waktu yang layak.
Berapa banyak produk *crude palm oil* (CPO) yang harus diproduksi agar mencapai titik impas.

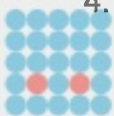
5. Tujuan Penelitian

Tujuan dilaksanakan penelitian atas investasi PMKS kapasitas 120 ton TBS/jam oleh PT Sawita Leidong Jaya adalah :

1. Mengkaji permintaan minyak kelapa sawit baik di pasar domestik maupun ekspor.
2. Mengkaji kemampuan teknis dan teknologis dalam pengembangan industri pabrik PMKS.
3. Mengkaji faktor internal dan eksternal (SWOT) dalam pembangunan pabrik PMKS.
4. Mengkaji kelayakan investasi secara financial dengan menggunakan komposisi sumber pendanaan investasi pabrik PMKS sebesar 35% dari modal sendiri dan 65% dari pinjaman perbankan.

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik IPB



MB-IPB
Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis
Institut Pertanian Bogor

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



1.6. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan masukan dalam pengambilan keputusan oleh pihak manajemen PT Sawita Leidong Jaya sehubungan dengan investasi pabrik PMKS kapasitas 120 ton TBS/jam yang pembangunannya sedang berjalan di Kabupaten Rokan Hilir – Riau. Disamping itu dapat dipergunakan oleh pihak manajemen PT Sawita Leidong Jaya untuk menyusun profosal permohonan kredit kepada perbankan.

1.7. Ruang Lingkup Penelitian

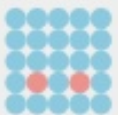
Dengan pertimbangan luasnya aspek kajian mengenai kelayakan investasi PMKS dan terbatasnya waktu penelitian, agar lebih terfokus maka ruang lingkup penelitian dibatasi sbb. :

Kajian investasi hanya difokuskan pada kelayakan aspek finansial setelah memperhatikan hasil kajian pada aspek teknis, pasar, internal dan eksternal serta aspek keuangan yang terkait dengan investasi PMKS kapasitas 120 ton TBS/jam oleh PT Sawita Leidong Jaya.

2. Pengukuran kelayakan investasi menggunakan beberapa alternatif komposisi sumber dana antara modal sendiri dengan pinjaman perbankan yang akan dilakukan uji kelayakan finansial.

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta MB-IPB



Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis
Institut Pertanian Bogor
MB-IPB

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.